PERAN ASEAN COMMISSION ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF THE RIGHTS WOMEN AND CHILDREN (ACWC) DALAM MENANGGULANGI WOMEN TRAFFICKING DI INDONESIA TAHUN 2018-2020

Oleh: Cheryl Puspa Amaria
(Email : cheryl21p.a@gmail.com)
Pembimbing: Dr. Tri Joko Waluyo, M. Si
(Email : tri03joko@gmail.com)

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Tlp/Fax. (0761) – 63277, 23430

ABSTRACT

This research is done focusing on the role of ACWC in Indonesia on combatting trafficking of women in 2018-2020. ACWC is a regional corporation under ASEAN, focusing on the protection of women's and children's rights, including all transnational women protection activities in ASEAN's member states. This research is aiming to understand the role of one group to another group.

This research is done by using international organisation theory, group analysis level to understand the influence of a group on certain issue. The data are collected by using qualitative methodology, collecting data by using library research method, most of the data are published by ACWC official website, ASEAN official website, journals and books that talking about women trafficking in Indonesia.

The result of this research showed that ACWC contributing in helping Indonesia on combatting women trafficking is done by many ways, through assisting law that is needed in Indonesia, National Action Plan, establishing law corporation in national level, providing support in medical and law capacity, improving public awareness by doing gender mainstreaming in programmes and social campaign in public.

Key Words: ACWC, Indonesia, Women Trafficking, ASEAN, Sexual Exploitation

PENDAHULUAN

Perdagangan orang adalah istilah dari perbudakan yang merupakan prostitusi, memperdagangkan tubuh manusia, dan menggunakan anak-anak untuk terlibat dalam konflik bersenjata. Perdagangan orang banyak terjadi pada perempuan, tidak hanya pada perempuan perdagangan orang juga terjadi pada laki-laki, anak-anak, dan bayi.¹

Tingginya angka perdagangan di negara anggota ASEAN dikarenakan masih banyaknya kelalaian dalam migrasi internasional. Migrasi Internasional tanpa adanya pengawasan yang ketat menjadikan perdagangan manusia rentan terjadi. Indonesia merupakan contoh negara yang perdagangan orangnya cukup tinggi karena kurangnya pengawasan terhadap migrasi internasional. Indonesia menjadi negara asal, transit, dan tujuan perdagangan manusia yang lebih dominan terjadi pada perempuan dan anak-anak.²

Perdagangan perempuan cukup tinggi di negara Asia Tenggara salah satunya adalah Indonesia, dikarenakan Indonesia negara yang kehidupan patriarki masih di junjung tinggi dan kesetaraan jender masih sangat minim menjadi penyebab terjadinya perdagangan perempuan. Para korban dijanjikan pekerjaan dengan upah yang sangat besar oleh agen kerja ilegal. Para pelaku kejahatan melakukan berbagai modus untuk memindahkan perempuan sebagai komoditas agar mendapat untung yang besar dengan cara pemalsuan identitas dan paspor.³ Hal tersebut disebabkan karena

kurangnya wawasan dan pengetahuan para korban dalam dunia perekrutan pekerjaan. Indonesia harus berupaya meningkatkan keamanan negara untuk melindungi perempuan dan anak agar mengurangi terjadinya perdagangan orang.⁴

ACWC menjadi organisasi yg spesifik didirikan ASEAN yang bertujuan menangani kasus HAM perempuan dan anak-anak, yg mempromosikan, melindungi dan mengadvokasi hak-hak perempuan dan anak-anak di Asia Tenggara dan menciptakan rekomendasi masa depan.⁵ Kinerja ACWC dinilai berdasarkan perjanjian internasional dan standar hak asasi insan yg relevan, paling tidak Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) & Konvensi Hak Anak (CRC), seluruh Anggota ASEAN Negara-negara sudah meratifikasi perjanjian-perjanjian ini, & keduanya secara eksplisit disebutkan pada Kerangka Acuan ACWC.

Pada tahun 2010 Indonesia bekerja sama dengan ASEAN dan membentuk *Asean Commission on The Promotion and Protection of The Rights Women and Children* (ACWC) yang bertujuan untuk menanggulangi masalah perdagangan orang yang terjadi di Asia Tenggara. ACWC dibentuk pada tanggal 7 April 2010 di Hanoi, Vietnam. ACWC juga membentuk isu *gender mainstreaming* dalam ASEAN *sectoral bodies*,⁶ ACWC komisi di bawah naungan ASEAN

¹ Yustisia, "Bagaimana kondisi Trafficking di Indonesia". Diakses melalui <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/29272/20094> diakses

pada 12 Januari 2021. Pukul 09.22 WIB

² Rahmah Daniah dan Fajar Apriani. "Kebijakan Nasional Anti-trafficking dalam Migrasi Internasional (National Anti-Trafficking Policies in International Migration)" Vol 8 no. 2 November 2017

³ Hanako Fatimah Pertiwi, "Analisis Modus Operandi Sindikat Women Trafficking (Studi atas Tiga Kasus Human Trafficking dari NTT dan

Jakarta ke Malaysia)". Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 14 Nomer 1, Mei 2018. Hal 1

⁴ Damenta Sembiring, "Analisis Yuridis Terhadap Perempuan Sebagai Korban Perdagangan Manusia dalam Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia." Volume V. Jilid 2. Juli-Des 2018.

⁵ Asian Forum for Human Rights and Development "Report on the ACWC+10: Assessing the Commission's Impact on Protecting Women and Children's Rights in ASEAN". Diakses melalui <https://www.forum-asia.org/?p=33115>

⁶ Setnas ASEAN, "Pilar Sosial dan Budaya". Diakses melalui <http://setnas-asean.id/pilar-sosial-budaya> diakses pada 12 Januari 2021. Pukul : 19.03 WIB

memiliki fokus yang perduli dengan tingginya perdagangan perempuan dan anak terkhusus Indonesia. Indonesia dan ASEAN melalui ACWC memiliki tujuan dan prinsip yang sama dalam memberantas adanya kejahatan perdagangan perempuan dan anak.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan perdagangan perempuan di Indonesia merupakan misi yang masih jauh dari kata tuntas, oleh sebab itu dibutuhkan peran dari pihak luar untuk membantu Indonesia dalam menghadapi kasus perdagangan perempuan ini, oleh karena itulah penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini dengan judul **“Peran ACWC dalam menanggulangi *women trafficking* di Indonesia tahun 2018-2020”**

KERANGKA TEORI

a. Perspektif Institusionalisme

Penulis menggunakan perspektif Institusionalisme, yang berpengaruh besar pada teori ini adalah Robert Keohane dan Josep Nye. Institusionalisme berpendapat bahwa sebuah institusi internasional membantu kerja sama yang dilakukan antar negara. Dalam perspektif ini negara-negara bekerjasama untuk mencapai kepentingan bersama dalam institusi. Perspektif ini membantu menjawab dari penelitian ini dimana Indonesia bekerjasama dengan Organisasi Internasional regional Asia yaitu ASEAN dalam permasalahan perdagangan perempuan.

Keohane menyatakan bahwa Neoliberalisme institusional percaya terhadap institusi internasional dapat berperan dalam melakukan kerja sama. Dalam kerjasama organisasi internasional, Neoliberalis berpatokan pada institusi yang menjadi variabel independen yang menjadi

penentu keuntungan yang menjadi pertimbangan penting.⁷

b. Tingkat Analisa Kelompok

Pada saat mengkaji studi hubungan internasional, perlu mengidentifikasi tingkat eksplanasi terlebih dahulu agar saat proses pembetulan teori lebih jelas. Ada lima tingkat analisa menurut Stephen Andriole yaitu: tingkat individu, tingkat kelompok individu, tingkat negara bangsa, tingkat antar negara dan tingkat sistem internasional.⁸ Berdasarkan rujukan tersebut, penulis menggunakan tingkat analisa Kelompok. Yang berasumsi bahwa pada dasarnya pembuat keputusan akan berperilaku sama pada saat mengalami situasi yang sama⁹. Dalam mempelajari hubungan internasional harus memahami terlebih dahulu perilaku dari kelompok-kelompok kecil dan organisasi yang ikut terlibat.

ACWC merupakan actor yang berperan sebagai Kelompok yang dibentuk untuk menangani sebuah permasalahan perdagangan perempuan dan anak. ACWC adalah tempat strategis untuk dapat mengambil tindakan dalam menyelesaikan kasus perdagangan perempuan dan anak ini.

c. Teori Peran Organisasi Internasional

Penulis menggunakan teori peran organisasi internasional dalam melakukan penelitian. Tujuan dari organisasi internasional merupakan sebagai wadah untuk mencapai tujuan bersama dalam melakukan kerja sama antar bangsa dan

⁷ Yusran, Afri Asnelly dan Elistania.” Mengkaji Neoliberal Institusionalisme Uni Eropa dalam Problematika Implementasi Kebijakan Migrasi Pada Traktat Lisbon”. Diakses melalui <https://ojs.uph.edu/index.php/JHIV/article/download/722/238>

diakses pada, 06 Februari 2020. Pukul 12.34 WIB
⁸ Mohtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1994).

⁹ Mohtar mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi (Edisi Revisi)*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1990.)

negara, dan setiap negara dalam mencapai kepentingannya bisa terjamin didalam hubungan internasional.¹⁰

Organisasi internasional menurut Clive Archer adalah struktur formal berkesinambungan dibentuk berdasarkan kesepakatan antar anggota yang terdiri dari dua atau lebih negara dalam mencapai tujuan bersama para anggotanya. Pembahasan terkait organisasi internasional dijelaskan lebih rinci oleh Archer dengan mengklasifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas, dan strukturnya. Keberhasilan peran organisasi internasional diakui dalam menangani permasalahan dari suatu negara, secara tidak langsung organisasi internasional menjadi sarana kerja sama dan berpengaruh dalam bagaimana negara bertingkah laku.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, semua wilayah yang mencakup 34 provinsi merupakan titik sumber dan destinasi kasus perdagangan manusia¹², dimana korban anak-anak dijual dengan tujuan eksploitasi seksual di Batam dan Papua Barat, dan korban perempuan dipaksa untuk bekerja di industri prostitusi dekat wilayah pertambangan di provinsi Jambi, Maluku, dan Papua.¹³ Pemerintah Indonesia menetapkan lima wilayah zona merah untuk kasus perdagangan manusia di tahun 2017, wilayah tersebut adalah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa

Barat.¹⁴ Di tahun 2015, ditemukan pola baru sindikat perdagangan manusia di Indonesia yang menargetkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang keluar meninggalkan Indonesia untuk bekerja.¹⁵ Pola tersebut dapat dipengaruhi oleh lemahnya sistem keamanan administrasi di lintas batas dan tingginya tingkat pemalsuan dokumen yang mempersulit pihak berwajib dalam mengawasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri.

Berdasarkan laporan, kebanyakan korban perdagangan manusia di Indonesia mengenal pelaku melalui jejaring internet, hal yang kemudian memperluas akses pelaku terhadap korban perempuan dengan pemahaman minim tentang dunia luar.¹⁶ Perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia terjadi terutama karena faktor kemiskinan, kebanyakan korban perdagangan manusia dari Indonesia dikirim menuju destinasi negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Hongkong melalui Kepulauan Riau, Kalimantan, dan Sulawesi.¹⁷ Korban perempuan adalah mereka yang berada dalam posisi ekonomi sulit dan membutuhkan pekerjaan untuk bertahan hidup, hal ini dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan manusia untuk menipu korban perempuan, pelaku perdagangan manusia akan menjanjikan pekerjaan dengan pemasukan yang layak, pekerjaan yang dijanjikan pada umumnya adalah sebagai pegawai di perusahaan atau restoran, dan pekerjaan domestik lainnya.¹⁸

¹⁰ Le Roy A. Bennet. *International Organizations: Principles and Issues* (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1997).

¹¹ A.A, Perwita. & Y.M, Yani. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2005).

¹² U.S. Department of State, "Trafficking in Persons Report July 2015," (20 September 2015), online: U.S. Department of State, <https://www.state.gov/documents/organization/245365.pdf>, hlm. 18.

¹³ Ibid.

¹⁴ Republika.co.id, "Lima Provinsi Masuk Zona Merah Perdagangan Manusia," 24 November 2017, diakses pada 22 Juli 2021.

¹⁵ Everd Scor Rider Daniel, dkk, "Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur," *Social Work Jurnal* No. 1 Vol. 7, 2015.

¹⁶ MTV Exit, "The New Cyber Trend in Human Trafficking: How to Stay Safe Online," 28 November 2013, <http://exitlavery.org/human-trafficking-goes-cyber-stay-online/>.

¹⁷ US State Department, "Trafficking in Persons Report 2008-Indonesia," 4 Juni 2008. <http://www.state.gov/documents/organization/105658.pdf>.

¹⁸ Ibid.

A. Pengaruh ACWC di Indonesia terkait Isu Perdagangan Perempuan

Dalam melaksanakan upaya perlawanan terhadap perdagangan perempuan di Indonesia, ACWC menjadi standar regional bagi negara anggota ASEAN untuk melaksanakan program yang melindungi hak perempuan, terutama perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia.

1. Pembuatan Dasar Hukum

Dasar hukum yang sah merupakan instrumen utama untuk melawan tindakan kriminal seperti perdagangan manusia, di dalam hukum terdapat berbagai standar operasional prosedur, sanksi, dan juga perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Hukum ini mengadopsi standar dari ACWC dalam menanggulangi kasus perdagangan manusia di ASEAN, berikut merupakan dasar hukum yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk melawan perdagangan perempuan pada tahun 2016-2020.

1.1 National Action Plan (NAP)

NAP tentang Pencegahan terhadap Perdagangan Manusia atau disebut juga Rencana Aksi Nasional Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN-PTPPO) yang dimulai sejak tahun 2015-2019 diangkat melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) No.2/2016, NAP tersebut memberikan pedoman bagi gugus tugas dalam melawan dan menangani kasus perdagangan manusia.

1.2 Pertolongan Medis, Psikologis, dan Hukum

Regulasi Pemerintah Pasal 37-45 tentang Ketetapan Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan untuk Saksi dan Korban No. 7/2018 mengatur bantuan medis dan psikologis, hal ini mengharuskan LPSK untuk menyediakan bantuan medis dan

rehabilitasi psikologis dan/atau mengarahkan korban dan saksi untuk menerima perawatan dari pihak rumah sakit atau pusat kesehatan, serta pusat rehabilitasi menggunakan dana LPSK. Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia meningkatkan standar usia menikah bagi perempuan dalam undang-undang No.24/2003, dengan melakukan hal ini diharapkan dapat menekan kasus pernikahan dini dan penculikan perempuan muda untuk dijual dan dijadikan pengantin pesanan.

1.3 Anugrah Parahita Ekapraya Awards

Untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan dari *gender mainstreaming* dibuatlah Peraturan No.07/2018 tentang Pengawasan dan Indikator Evaluasi dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yang disebut sebagai Anugrah Parahita Ekapraya Awards. Penghargaan ini diberikan satu kali dalam dua tahun, menargetkan pemerintahan lokal dan nasional yang berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam melakukan *gender mainstreaming* di program dan daerah mereka.

1.4 Pembentukan Badan Hukum

Pemerintah Indonesia membentuk badan nasional untuk penempatan dan perlindungan terhadap warga negaranya yang bekerja di luar negeri sebagai bentuk dukungan pada undang-undang anti perdagangan manusia. Badan ini disebut BNP2TKI, menyediakan pelayanan seperti distribusi kartu pengenal biometrik untuk migran, hotline nasional anti perdagangan manusia, dan pembuatan database nasional berisi informasi migran terdaftar yang meninggalkan Indonesia untuk bekerja di luar negeri.

2. Awareness Raising

Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan hak manusia, termasuk hak perempuan dan anak merupakan hal yang penting untuk meningkatkan perhatian kepada hak perempuan dan juga anak. Untuk

melakukan hal tersebut diperlukan pendekatan yang bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

2.1 Gender Mainstreaming

Pendekatan *gender mainstreaming* dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender di lingkungan masyarakat. *Gender mainstreaming* adalah strategi pendekatan kesetaraan gender untuk membuat perancangan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program dalam lingkup politik, ekonomi, dan masyarakat dengan mempertimbangkan pengalaman para perempuan dan laki-laki agar terbentuknya kesetaraan gender.¹⁹ Tujuan dari *gender mainstreaming* adalah agar terbentuknya pembangunan yang melibatkan peran perempuan dan laki-laki dan memberikan setiap orang dalam lapisan masyarakat kesempatan, akses, dan manfaat yang sama untuk membangun bangsa, dan kesetaraan tersebut diwujudkan dalam bentuk analisis dan evaluasi mendalam terlebih dahulu sebelum suatu kebijakan dilaksanakan. Salah satu contoh pendekatan ke masyarakat adalah dengan meningkatkan dukungan publik untuk kampanye 16 Hari Aktivistis melawan *gender based violence* (GBV) di tahun 2018.

2.2.1 Serempak dan Setara

Program *gender mainstreaming* sudah dimulai melalui platform digital sejak tahun 2015 hingga 2018, dua dari platform digital tersebut adalah Serempak dan Setara. Serempak merupakan program berbasis digital untuk memfasilitasi interaksi dan penyebaran informasi mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.²⁰ Platform tersebut

mengumpulkan berbagai gagasan, proposal, dan rekomendasi dari berbagai komunitas untuk meningkatkan program pemberdayaan perempuan di Indonesia. Sedangkan Setara adalah pergerakan sosial untuk meningkatkan kesadaran komunitas terhadap pentingnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan untuk anak. Gerakan ini dilakukan dengan menyebarkan informasi dan mengundang tokoh publik sebagai pembicara untuk mengangkat isu pemberdayaan perempuan.

2.2.2 Roadshow Programme

Program *roadshow* Jelajah 3Ends dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berfokus pada pemberantasan tindakan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan domestik, perdagangan manusia, dan keadilan ekonomi untuk perempuan. Terdapat pergerakan sosial lain seperti Gerakan Bersama (Geber) yang berusaha mengakhiri kekerasan domestik dan perdagangan manusia, serta Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) berfokus pada pembangunan komunitas yang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jelajah 3Ends terakhir diselenggarakan di kota Bandung, Jawa Barat pada tahun 2016.

3. Pelatihan untuk Pegawai Publik dan Penegak Hukum

Pemerintah Indonesia mengadakan pelatihan hak asasi manusia mengenai prinsip dasar dari perlindungan hak perempuan, ditujukan untuk pegawai pemerintahan, pegawai kementerian, pelayanan publik, dan kepolisian. Pihak kepolisian dan penegak hukum menjadi prioritas dalam pelatihan untuk melindungi hak perempuan dan anak, sebab dalam kasus kekerasan dan perdagangan perempuan, pihak pertama yang akan menangani kasus korban adalah kepolisian, untuk dapat menangani kasus perdagangan manusia, terdapat banyak

¹⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *mediakita.i-d*, 06 Maret 2019, diakses pada 23 Juli 2021.

²⁰ The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection Republic of Indonesia, "Indonesia's

Eight Periodic CEDAW Report 2016-2019," <https://www.kemenpppa.go.id>.

aspek yang perlu diperhatikan oleh petugas.

4. Kerja sama dengan Aktor Lain

Indonesia melakukan kerja sama dalam memahami pedoman dalam pengumpulan data kekerasan terhadap perempuan dan kerja sama analisis dengan ACWC bersama *UN Women* Kanada pada tahun 2018.²¹ Kerja sama dengan pihak luar dapat membantu perluasan informasi dan pemahaman Indonesia dalam melawan aktivitas perdagangan manusia, kerja sama ini dibantu oleh ACWC dan *UN Women* yang berada di Kanada.

B. Kendala dalam Menanggulangi Isu dan Perdagangan Perempuan

Melakukan pembaharuan undang-undang dan berbagai upaya sosial lainnya tidak membuat perlawanan terhadap perampasan hak asasi perempuan, dalam kasus ini perdagangan manusia menjadi lebih mudah. Terdapat beberapa kendala utama yang berkaitan erat dengan budaya dan sistem yang sudah ada sejak awal di Indonesia, untuk melawan nilai-nilai patriarki dan sistem yang memandang lemah perempuan adalah tugas yang berat. Berikut ini beberapa kendala yang menghambat perlawanan terhadap kejahatan perdagangan perempuan Indonesia.

1. Kebebasan Hukum dan Patriarki

Terdapat banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak menempuh jalur hukum disebabkan oleh sistem hukum yang lemah dalam menghadapi sistem patriarki yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang bersalah

dalam banyak kasus.²² Stigma tersebut mempengaruhi bagaimana perempuan melindungi diri mereka sendiri, banyak yang memilih untuk diam karena bersuara dianggap akan memperburuk keadaan, diikuti dengan penghakiman buruk dan perlakuan tidak menyenangkan di lingkungan masyarakat dengan budaya patriarki kuat. Membuat perempuan kehilangan kepercayaan akan rasa aman jika berusaha mendapatkan keadilan atas perlakuan yang mereka terima dari laki-laki atau pelaku perdagangan manusia.

2. Peningkatan Mobilitas Internasional

Indonesia sudah meratifikasi banyak perjanjian dan konvensi internasional demi melindungi hak perempuan, seperti CEDAW, CERD, CRC, CAT, ICCPR, ICESCR, CMW, dan CRPD.²³ Namun Indonesia belum bisa memenuhi tanggung jawab untuk melaporkan mekanisme di atas secara menyeluruh, ketika mekanisme di atas berpusat pada tujuan yang tidak jauh berbeda. Di saat Indonesia masih berupaya membenahi suatu program atau sistem yang berlaku, dunia internasional sudah datang dengan program baru dan upaya baru untuk dilaksanakan dan dikembangkan. Sebagai contoh, terdapat kebijakan restitusi yang belum jelas, restitusi adalah pembayaran dana kerugian kepada korban yang harus diberikan oleh pelaku berdasarkan putusan pengadilan berdasarkan Undang Undang Nomor 35

²¹ ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) Work Plan 2016-2020 Jakarta: ASEAN Secretariat, Desember 2018.

²² Terdapat banyak kasus pelanggaran manusia yang menyerang korban perempuan tidak bisa diselesaikan oleh negara. Tragedi 1965, dengan 122 korban, 74 kasus pemerkosaan, dan 21 kasus perbudakan modern. Tragedi Mei 1998, mendokumentasikan 85 perempuan sebagai korban kekerasan seksual dan pemerkosaan. 103 kasus pelecehan terhadap perempuan di konflik Aceh. 138 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan 14 kasus kekerasan berlapis di Papua. 72 kasus kekerasan terhadap perempuan di Poso dan 853 kasus kekerasan terhadap perempuan di Timor Leste.

²³ Komnas Perempuan, "25 Years of Implementing the Beijing Platform Action (BpFA+25) in Indonesia," 27 September 2019, hlm. 12.

tahun 2014 Tindak Pidana Pemberantasan Orang. Undang undang tersebut hanya mengatur tentang kerugian secara materi yang dialami korban, tapi tidak ada kejelasan mengenai kerugian non-materi yang harus ditanggung korban seumur hidupnya, seperti trauma, gangguan pada kesehatan mental, dan harga diri korban.²⁴ Tidak adanya standar operasional prosedur yang jelas mengenai pelayanan terhadap korban perdagangan manusia menyebabkan semua instansi pemerintahan yang terlibat dalam melawan perdagangan manusia, bekerja tanpa terhubung dengan satu sama lain, melakukan pekerjaan individu ketika yang dihadapi adalah bentuk kejahatan luar biasa.

3. Korupsi

Korupsi yang tinggi di Indonesia memfasilitasi aktivitas perdagangan manusia, korupsi menyebabkan terjadinya pemalsuan data diri korban, passport, dan visa²⁵, hal ini membuat korban terekspos tanpa sedikit pun perlindungan atau akses untuk meminta pertolongan. Tindakan korupsi di bagian administrasi dan transportasi lintas batas ini kemudian berujung pada kesulitan pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan sebab semua informasi yang digunakan oleh pelaku adalah palsu. Kebanyakan korban akan menolak berurusan dengan kepolisian yang berkemungkinan dijual kembali oleh kepolisian yang korupsi.

KESIMPULAN

Dalam melakukan upaya perlawanan terhadap aktivitas perdagangan

manusia, Indonesia berpedoman pada perjanjian internasional seperti CEDAW dan *Beijing Platform for Action* yang juga diadopsi oleh ASEAN dalam komisi khusus yang menangani isu hak asasi manusia dan perlindungan hak perempuan, dalam hal ini ACWC sebagai organisasi di kawasan ASEAN. Upaya yang dilakukan dari mengadopsi nilai-nilai dalam perjanjian internasional dan berpedoman pada *National Action Plan ACWC* selama tahun 2018 hingga 2020 adalah dibuatnya regulasi hukum demi melawan perdagangan manusia, termasuk prosedur perlindungan terhadap korban perempuan, dan berbagai bentuk bantuan kesehatan, psikologis, dan hukum yang layak diterima oleh korban dan saksi perdagangan manusia.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan hak perempuan melalui pendekatan *gender mainstreaming*, pendekatan ini berupaya mencapai terbentuknya kesetaraan gender di lingkungan masyarakat secara mendasar, dilakukan dengan membentuk pergerakan sosial yang melawan perdagangan perempuan di Indonesia, dibentuknya platform interaksi digital oleh pemerintah untuk menampung masukan, ide, dan proposal dari masyarakatnya secara online, penyediaan platform seperti demikian diharapkan dapat membuat masyarakat menyadari pentingnya untuk melindungi hak orang lain dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk didengar oleh pemerintah.

Pemerintah Indonesia bersama dengan ACWC melakukan berbagai upaya untuk melawan perdagangan perempuan, diawali dengan pembuatan dasar hukum untuk menangani kasus kekerasan dan perdagangan perempuan, pembentukan *National Action Plan* yang berfokus untuk melawan perdagangan perempuan, diselenggarakannya Penghargaan Parahita

²⁴ Andi Fardian dan Gerralda Chyntiaarizma Putri Aksa, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Indonesia dalam menangani Kasus Human Trafficking," *Jurnal Widya Pranata* Vol. 3 No. 1, Februari 2020.

²⁵ Fatimana Agustinanto, Jamie Davis, dkk, *Trafficking of Women and Children in Indonesia, Uni-ted States Agency for International Development (USA ID)*, (Jakarta: International Catholic Migration Commission), hlm. 25.

Ekapraya untuk memberikan penghargaan kepada badan atau institusi yang memberi upaya maksimal dalam *gender mainstreaming* dan mencegah kekerasan serta perdagangan perempuan, dibentuknya badan BNP2TKI untuk melindungi dan mengawasi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri untuk bekerja atau studi, peringatan 16 Hari Aktivistis Melawan Kekerasan terhadap Perempuan, dibuatnya program acara dan roadshow seperti Setara dan Serempak yang berfokus pada isu kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan perempuan di Indonesia. Semua upaya tersebut dilakukan dengan setiap institusi terkait saling bekerja sama dalam memerangi perdagangan perempuan sebab isu ini bukanlah isu yang bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan satu badan tertentu.

Melakukan kerja sama dengan aktor lain seperti pihak *UN Women* ikut serta dalam membantu pemahaman petugas hukum di Indonesia untuk memahami pola perdagangan manusia dan menganalisis cara untuk mengatasi kasus tersebut, pengadaan pelatihan dan seminar juga diberikan kepada pihak kepolisian, penegak hukum, petugas pelayanan publik, pegawai negara, pelajar, dan masyarakat luas untuk memahami dan menyadari keberadaan dari kasus perdagangan manusia. Indonesia juga meratifikasi berbagai perjanjian dan peraturan baik secara nasional, regional, dan internasional untuk melawan kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan perempuan yang sering terjadi di daerah perbatasan wilayah Indonesia. Pentingnya pemahaman tentang standar penanganan kasus perdagangan perempuan di level internasional menjadi hal penting bagi petugas keamanan di perbatasan wilayah kekuasaan Indonesia, mengingat bahwa banyak perempuan korban perdagangan manusia tidak hanya dibawa keluar dari Indonesia, terdapat juga korban yang dibawa dari luar negeri untuk memasuki Indonesia.

Referensi

- ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) Work Plan 2016-2020. (Jakarta: ASEAN Secretariat, Desember 2018).
- Asian Forum for Human Rights and Development “Report on the ACWC+10: Assessing the Commission’s Impact on Protecting Women and Children’s Rights in ASEAN”. <https://www.forum-asia.org/?p=33115>
- Bennet, L. *International Organizations: Principles and Issues*. New Jersey: Prentice Hall Inc, 1997.
- Daniah, Rahmah dan Fajar Apriani. “Kebijakan Nasional Anti trafficking dalam Migrasi Internasional (National Anti Trafficking Policies in International Migration)” Vol 8 no. 2 (2017)
- Fardian, Andi., dan Gerralda Chyntiaarizma Putri Aksa. “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Indonesia dalam menangani Kasus Human Trafficking.” *Jurnal Widya Pranata* Vol. 3 No. 1. (2020).
- Komnas Perempuan. “25 Years of Implementing the Beijing Platform Action (Bpf-A+25) in Indonesia.” 27 September 2019.
- Perwita, A.A dan Yani, Y.M. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2005.
- Pertiwi, Hanako Fatimah. “Analisis Modus Operandi Sindikat Women Trafficking (Studi atas Tiga Kasus Human Trafficking dari NTT dan Jakarta ke Malaysia).” *Jurnal Kriminologi*

Indonesia Volume 14 Nomer 1.
(2018) Hal 1

Plano, Jack C dan Roy Olton. *The International Relations Dictionary*. (England : Clio Press, Ltd. 1979) Hal. 271

Puspahapsari, Adiningrum. "Implementasi Conter-Trafficking Internasional Organization For Migration (*IOM*) Dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia Di Indonesia Tahun 2007-2013." Vol.1 . No.3, (2015) 18-24

Setnas ASEAN, "Pilar Sosial Budaya". <http://setnas-asean.id/pilar-sosial-budaya>

Sembiring, Damenta. "Analisis Yuridis Terhadap Perempuan Sebagai Korban Perdagangan Manusia dalam Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia." Volume V. Jilid 2. (2018)

The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection Republic of Indonesia, "*Indonesia's Eight Periodic CEDAW Report 2016-2019*," <https://www.kemenpppa.go.id>.

Yusran, Afri Asnelly dan Elistania. "Mengkaji Neoliberal Institutionalisme Uni Eropa dalam Problematika Implementasi Kebijakan Migrasi Pada Traktat Lisbon". <https://ojs.uph.edu/index.php/JHIV/article/download/722/238>.

Yustisia, "Bagaimana kondisi Trafficking di Indonesia". <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/29272/20094>